



LAPORAN MONITORING & EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI DI BADAN PUBLIK TAHUN 2023



Kid_diy



komisiinformasidiy



www.komisi-informasi.jogjaprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmad-Nya sehingga diberi kemudahan didalam melaksanakan kegiatan Komisi Informasi Daerah DIY sampai saat ini khususnya dalam kegiatan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Tahun 2023.

Kegiatan Monev Keterbukaan Informasi publik merupakan agenda tahunan yang memang diamanatkan oleh Peraturan Daerah DIY No. 4 Tahun 2021 dan juga PerKi No.1 Tahun 2022 yang bertujuan agar badan publik di DIY dapat dilihat tingkat kepatuhan dalam implentasi undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada monev tahun 2023 ini sudah tidak dilakukan kejuaraan, tetapi hanya memberikan apresiasi terhadap badan publik yang mencapai informatif dengan nilai 3 tertinggi, dan badan publik yang memiliki nilai 100.

Pada pelaksanaan monev tahun 2023 ini, keterlibatan anggota tim eksternal baik dari BRIN, UGM Yogyakarta, Unisa Yogyakarta, Atmajaya Yogyakarta, UII Yogyakarta, PUKAT UGM Yogyakarta, CRI Yogyakarta, dan Idea Yogyakarta sangat membantu baik dalam hal ide, gagasan dan tenaga sehingga mendapatkan hasil yang lebih berkualitas. KID DIY mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dedikasinya kepada tim eksternal didalam membangun iklim keterbukaan informasi publik di DIY.

Sebagai penutup, Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public tahun 2023 ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saran, kritik dan masukan yang konstruktif sangat di butuhkan untuk perbaikan kedepan.

Demikian dan terima kasih

Yogyakarta, September 2023
Ketua KID DIY

H. Moh. Hasyim, SH,M.Hum

DAFTAR ISI

Sampul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Kegiatan, Maksud, dan Tujuan	1
C. Proses dan Mekanisme	2
D. Pemeringkatan (Kualifikasi)	3
BAB II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI	5
A. Pemeringkatan Badan Publik.....	5
1. Gambaran Partisipasi Badan Publik.....	5
2. Gambaran Pengisian SAQ oleh Badan Publik	6
3. Verifikasi Awal SAQ	7
4. Verifikasi Faktual	9
B. Pemberian Apresiasi	10
BAB III. CATATAN HASIL MONEV	12
A. Sisi Badan Publik	12
B. Sisi Team Monev.....	12
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN PERBAIKAN	14
A. Kesimpulan	14
B. Saran Perbaikan.....	14

Lampiran

Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan akan hak atas Informasi Publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah adanya jaminan hak publik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam kehidupannya yang sesuai dengan peraturan yang ada dan Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Jaminan akan hak informasi publik bagi warga negara sangat penting untuk memastikan adanya peran serta masyarakat dalam pengawasan kerja-kerja pemerintahan sehingga mampu dipertanggungjawabkan secara publik. Partisipasi masyarakat tersebut tidak akan ada kalau tidak ada jaminan keterbukaan informasi publik.

Untuk mengukur sejauhmana kepatuhan Badan Publik dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada badan Publik dilakukan Monitoring dan evaluasi pada Badan Publik. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) yang salah satu Ketugasannya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan melaporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022..

Dengan dasar hukum PerKI No. 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, PerKI No. 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, serta PERDA No. 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan *"Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022"*

B. Dasar Kegiatan, Maksud, dan Tujuan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. didasarkan pada pasal 31 dan 32 Perda No. 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan mandat Komisi Informasi Daerah DIY untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik sesuai peraturan perundang – undangan. Sebagai pedoman teknisnya digunakan PerKI 1 Tahun 2021 dan PerKI 1 Tahun 2022.

Adapun maksud dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2023 adalah mendorong percepatan dan peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik di badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara tujuan Monitoring dan evaluasi Keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2023 adalah:

1. mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik di DIY dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengidentifikasi, menginventarisasi, dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di DIY;
3. menjadikan hasil monev sebagai bahan masukan kepada Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengambilan kebijakan terutama berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik di DIY; dan
4. melakukan pemeringkatan terhadap badan publik dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi public

C. Proses dan Mekanisme

Pada tahun ini merupakan tahun kedelapan yang dimulai pada tahun 2015 Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Diperjalanan waktu yang panjang tersebut selalu dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan monev tahun-tahun sebelumnya. Hal yang menjadi perubahan mendasar adalah terkait proses monevnya, disamping tentu saja terkait instrumen dan hal teknis lainnya.

Monitoring dan Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY tahun 2023 dimulai sejak bulan Februari sampai bulan September tahun 2023, bahkan proses-proes di internal sudah dilakukan di bulan januari seperti penyiapan rencana tim , rapat – rapat persiapan, pencermatan instrumen dan lain - lain. Kemudian tahapan selanjutnya, Tim akan melakukan sosialisasi ke semua badan publik, pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ), untuk menentukan peringkat badan publik dalam keterbukaan informasi publik.

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY tahun 2023 ini, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan lembaga / instansi lainnya diluar KID DIY baik dari perguruan tinggi, BRIN, CSO. Dari perguruan tinggi terdiri dari Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, UGM Yogyakarta , UII Yogyakarta, Atmajaya Yogyakarta. Sedangkan untuk anggota yang berasal *Civil Society Organization (CSO)* meliputi Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Yogyakarta, IDEA Yogyakarta, dan *Combine Resource Institution (CRI)*, dan SABDA Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik semua anggota tim berperan aktif sejak merumuskan instrumen penilaian sampai melakukan penilaian. Pelibatan tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga objektivitas, menyamakan persepsi, dan meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi.

Pada tahun 2023 diputuskan untuk klasterisasi badan publik menjadi 10 klaster/kelompok yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY;
2. OPD Pemerintah Daerah DIY;
3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY;
4. Kapanewon/Kemantren Se-DIY;
5. Partai Politik Se-DIY;
6. Lembaga Yudikatif di DIY;
7. Instansi Vertikal di DIY;
8. Lembaga Non Struktural di DIY; dan
9. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-DIY.
10. Sekolah/Madrasah

D. Pemeringkatan (Kualifikasi)

Pemeringkatan keterbukaan informasi pada Badan Publik dilakukan juga pada tahun ini yang sudah dilakukan mulai tahun pertama periode ke 3. Pada pemeringkatan diharapkan semua badan publik dapat mengetahui posisi kualifikasi badan publiknya. Hal tersebut penting agar badan publik dapat mengetahui kekurangannya, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya pada masa-masa mendatang.

Monev tahun 2023 dilaksanakan berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu tidak adanya tahapan kejuaran dan hanya pemeringkatan yang terdiri dari 2 (Dua) tahapan yaitu pengisian SAQ/Kuesioner dan Verifikasi Faktual. Penjelasan tiap tahap adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Penilaian Kuesioner Mandiri (SAQ)

Pada Tahapan ini terdiri dari tahap Pengisian *Self Assesment Quetionary* /Kuesioner mandiri pada Portal *e - Monev* sesuai alur dan tatakala yang sudah ditetapkan. Hasil dari pengisian SAQ akan dilakukan penilaian oleh tim yang selanjutnya akan mendapat hasil penilaian tahap pertama yang bersifat masih nilai sementara. Selanjutnya, atas hasil penilaian tahap pertama, Badan Pubilik dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil penilaian tahap pertama dengan waktu yang sudah tentukan yang disebut dengan masa sanggah. Masa sanggah ini dapat dikatakan juga dengan masa konfirmasi terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai . Ketentuan terkait sanggahan yang dapat dilakukan meliputi :

- a. sanggahan tidak dapat diajukan apabila link badan publik tidak dapat diakses oleh tim penilai sebanyak 2 (dua) kali dalam hari yang berbeda;
- b. sanggahan tidak dilayani apabila sudah melewati masa sanggah;
- c. sanggahan dapat diajukan dengan alasan:
- d. jawaban tidak diverifikasi tanpa diberi penjelasan/alasan; dan
- e. jawaban tidak diverifikasi dengan penjelasan/alasan bahwa dokumen yang disertakan tidak sesuai pertanyaan.
- f. dalam masa sanggah badan publik tidak diperkenankan mengubah atau menambah data/dokumen.

Sanggahan dilakukan oleh Badan Publik tidak dengan datang langsung namun menggunakan email/ surat elektronik ke Alamat monevkiddiy@gmail.com dan didalam isi suratnya Badan Publik harus menyebutkan variabel, nomor, dan pertanyaan pada SAQ. Sanggahan yang diterima dapat mempengaruhi hasil ditahap ini berupa nilai tetap, ataupun nilai menjadi berubah dengan bertambah nilainya

2. Tahapan Verifikasi Faktual

Tahap ini akan dilakukan terhadap badan publik yang peringkat informatif (nilai minimal 90) yang diperoleh dari hasil penilaian setelah masa sanggah. Tahap verifikasi faktual dapat berdampak turunnya nilai yang diperoleh pada pertanyaan SAQ jika tidak sesuai fakta dengan menunjukkan bukti yang diminta. Metode yang digunakan dalam tahapan ini adalah dengan uji respon terhadap email pelayanan permohonan informasi di masing-masing Badan Publik dengan waktu yang sudah ditentukan. Hasil dari respon email disampaikan pada waktu pelaksanaan verifikasi factual secara daring oleh tim. Pada tahapan ini tim juga mengkonfirmasi fakta beberapa jawaban pertanyaan yang ada di SAQ/Kuesioner dan sudah ditetapkan oleh tim. Pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan secara maraton melalui daring oleh tim monev dari tanggal 21 Agustus - 29 Agustus 2023 terhadap 180 Badan Publik.

Pemeringkatan dikategorikan menjadi beberapa yang didasarkan pada nilai yang diperoleh setelah dilakukan pembobotan. Kategori peringkat tersebut meliputi :

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Informatif | : Nilai 90 - 100 |
| b. Menuju Informatif | : Nilai 80 - 89 |
| c. Cukup Informatif | : Nilai 60 - 79 |
| d. Kurang Informatif | : Nilai 40 - 59 |
| e. Tidak Informatif | : Nilai < 40 |
| Tidak dinilai/Tidak Partisipatif | : Badan Publik tidak melakukan Registrasi |

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 terdiri dari dua penghargaan yang diberikan kepada badan publik terdiri dari Pemingkatan dan Pemberian Apresiasi kepada Badan Publik/Lembaga

A. Pemingkatan Badan Publik

1. Gambaran Partisipasi Badan Publik.

Pada tahun 2023 ini , Badan Publik yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi direncanakan sebanyak 397 dengan cara di berikan surat oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 362 Badan Publik (91,18%) yang melakukan registrasi pada Portal E-Monev dan yang tidak registrasi sejumlah 35 Badan Publik (8,82%). Secara detil setiap kategori/klaster dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

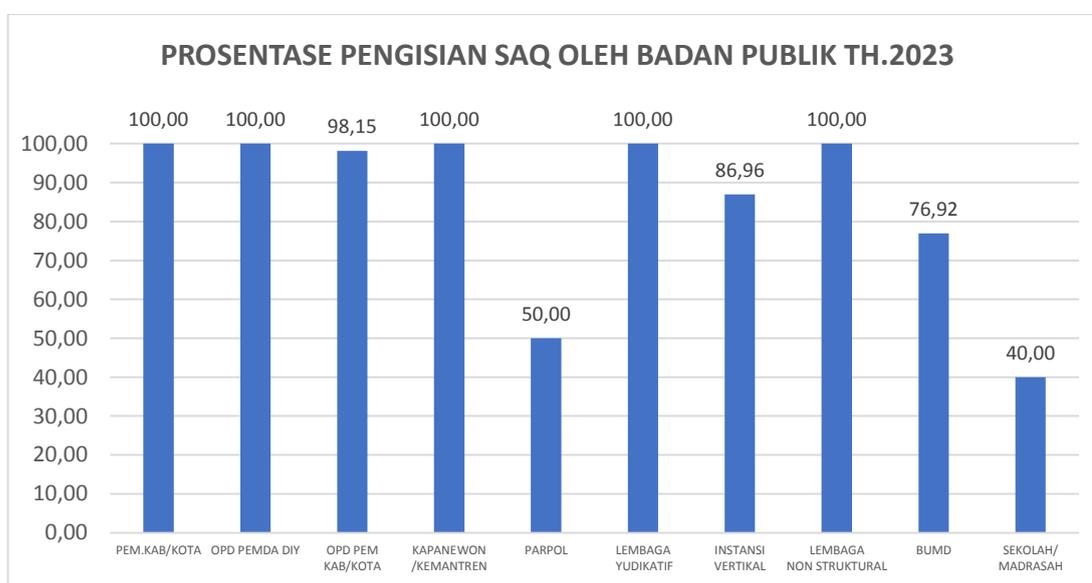
NO	KLASTER	JML BP	REGISTRASI	%
1	PEM.KAB/KOTA	5	5	100,00
2	OPD PEMDA DIY	39	39	100,00
3	OPD PEM KAB/KOTA	162	162	100,00
4	KAPANEWON /KEMANTREN	78	78	100,00
5	PARPOL	10	6	60,00
6	LEMBAGA YUDIKATIF	14	12	85,71
7	INSTANSI VERTIKAL	45	23	51,11
8	LEMBAGA NON STRUKTURAL	22	19	86,36
9	BUMD	17	13	76,47
10	SEKOLAH/MADRASAH	5	5	100,00
	JUMLAH	397	362	91,18

Tingkat partisipasi badan publik pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari partisipasi badan publik di tahun 2023 sebesar 91,18% dan tahun 2022 sebesar 90,31% Partisipasi terendah ada pada instansi vertikal yang hanya mencapai 51,11%. Hal tersebut di mungkinkan juga karena terbitnya PerKI Nomor 1 tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang didalam salah satu pasalnya menjelaskan bahwa instansi vertikal dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Jadi untuk UPT yang ada di provinsi sifatnya pilihan (tidak wajib) untuk mengikuti atau tidak.

2. Gambaran Pengisian SAQ oleh Badan Publik

Seperti sudah ditulis pada pendahuluan, bahwa penilain awal atau tahap pertama dimulai dari badan publik yang sudah melakukan registrasi kemudian melakukan pengisian SAQ di portal e monev pada tanggal 16 Mei - 13 Juni 2023.

Pada tahapan ini, sebanyak 362 badan publik yang melakukan registrasi, sebanyak 347 badan publik atau 95,86% melakukan pengisian SAQ dan 4,14% tidak melakukan pengisian. Jika di dibandingkan tahun sebelumnya, maka terjadi kenaikan prosentase badan publik yang melakukan pengisian SAQ sebesar 1,66%. Secara rinci pengisian SAQ di tiap klaster dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Dari 10 (sepuluh) klaster yang ada terdapat 5 (50%) klaster melakukan pengisian SAQ atau dengan kata lain 100% badan publiknya melakukan pengisian SAQ meliputi klaster Pemerintah Kab/Kota, OPD Pemda DIY, Kapanewon/Kemantren, Lembaga Yudikatif, dan Lembaga non struktural. Dibanding di tahun 2022 terjadi penambahan klaster yang melakukan pengisian SAQ yaitu Sedang yang lainnya tidak semua badan publik di klasternya melakukan pengisian yaitu OPD Pemda DIY, Kapanewon/Kemantren, dan Lembaga Yudikatif. Klaster yang terendah melakukan pengisian SAQ ada pada klaster sekolah/ madrasah yang hanya sebesar 20%. Hal tersebut dikarenakan sekolah/madrasah baru tahun ini mengikuti monev dan masih minimnya pendampingan dan intervensi yang dilakukan.

3. Verifikasi Awal SAQ

Setelah badan publik mengisi SAQ melalui portal e-monev sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka selanjutnya tim melakukan penilaian dan verifikasi terhadap pengisian SAQ pada tanggal 14 Juni - 2 Juli 2023 melalui portal e-monev untuk memberikan penilaian dan catatan (sebagai rekomendasi perbaikan) untuk pertanyaan yang tidak diverifikasi/dinilai. Hasil dari penilaian SAQ tahap pertama adalah sebagai berikut :

No	Klaster	Jml BP	REGIST RASI	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	Tidak dinilai
1	PEM.KAB/KOTA	5	5	5	0	0	0	0	0
2	OPD PEMDA DIY	39	39	8	17	14	0	0	0
3	OPD PEM KAB/KOTA	162	162	78	31	35	11	4	3
4	KAPANEWON /KEMANTREN	78	78	37	18	17	5	1	0
5	PARPOL	10	6	1	0	0	1	1	3
6	LEMBAGA YUDIKATIF	14	12	4	3	3	0	2	0
7	INSTANSI VERTIKAL	45	23	5	3	3	3	6	3
8	LEMBAGA NON STRUKTURAL	22	19	10	3	1	1	4	0
9	BUMD	17	13	2	0	1	2	5	3
10	SEKOLAH/ MADRASAH	5	5	0	0	0	1	1	3
	JUMLAH	397	362	150	75	74	24	25	15

Hasil penilaian pada tahap pertama sebanyak 41,44% badan public sudah mencapai peringkat informatif, 20,72 % badan publik dengan peringkat menuju informatif, 20,44% badan publik dengan peringkat cukup informatif, 6,63% badan publik dengan peringkat kurang informatif, 6,91% badan publik dengan peringkat tidak informatif, dan 4,14% badan public tidak dinilai karena tidak melakukan registrasi.

Setelah badan public mengetahui hasil penilaian tahap pertama maka selanjutnya memasuki masa sanggah pada tanggal 3 Juli - 7 Juli 2023. Badan public mengirimkan sanggahan lewat email yang kemudian akan dikompilasi sanggahan tersebut oleh secretariat untuk di telaah dan diverifikasi ulang jika sanggahan diterima. Prinsipnya pada tahap sanggahan nilai dinyatakan tetap

bilamana sanggahan tidak diterima, dan nilai bertambah sesuai bobot pertanyaan bilamana sanggahan diterima. Adapun rekapitulasi hasil pemeringkatan setelah masa sanggah adalah sebagai berikut :

No	Klaster	Jml BP	REGISTRASI	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	Tidak dinilai
1	PEM.KAB/KOTA	5	5	5	0	0	0	0	0
2	OPD PEMDA DIY	39	39	16	15	8	0	0	0
3	OPD PEM KAB/KOTA	162	162	97	23	25	10	4	3
4	KAPANEWON /KEMANTREN	78	78	39	17	16	5	1	0
5	PARPOL	10	6	1	0	0	1	1	3
6	LEMBAGA YUDIKATIF	14	12	4	3	3	0	2	0
7	INSTANSI VERTIKAL	45	23	5	3	3	3	6	3
8	LEMBAGA NON STRUKTURAL	22	19	11	2	1	1	4	0
9	BUMD	17	13	2	0	3	0	5	3
10	SEKOLAH/MADRASAH	5	5	0	0	0	1	1	3
	JUMLAH	397	362	180	63	59	21	24	15

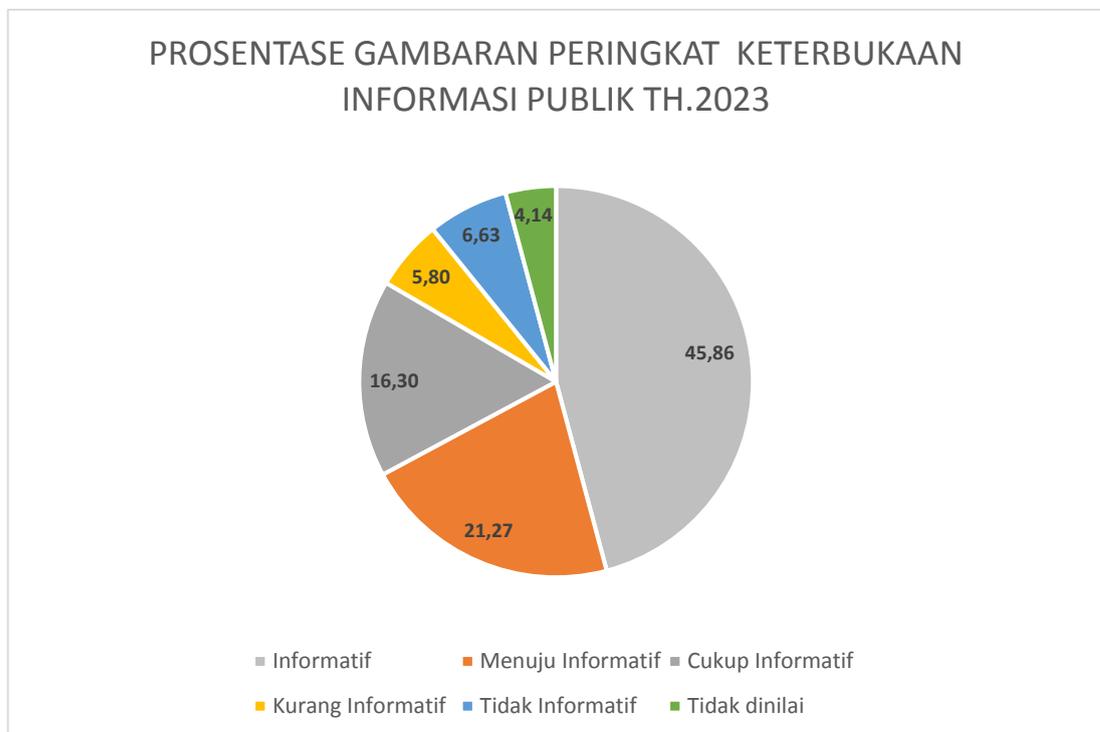
Hasil penilaian tim setelah masa sanggah sebanyak 49,72% badan public sudah mencapai peringkat informatif, 17,40 % badan publik dengan peringkat menuju informatif, 16,30% badan publik dengan peringkat cukup informatif, 5,80% badan publik dengan peringkat kurang informatif, 6,63% badan publik dengan peringkat tidak informatif, dan 4,14% badan public tidak dinilai karena tidak melakukan registrasi.

Jika dibandingkan peringkat informatif antara penilaian tahap pertama dengan sesudah masa sanggah terjadi kenaikan sebesar 8,29%. Kenaikan tersebut ada pada klaster OPD Pemda DIY naik sebesar 20,51%, OPD Pemkab/kota sebesar 11,73%, Kapanewon/Kemantren naik sebesar 2,56%, dan Lembaga Non Struktural naik sebesar 5,26%. Selain itu pada beberapa klaster juga terjadi kenaikan peringkat seperti di klaster Yudikatif dan BUMD.

4. Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual dilakukan terhadap badan publik yang berdasarkan verifikasi awal setelah hasil penilaian dari sanggahan memperoleh peringkat informatif (nilai ≥ 90). Pada verifikasi factual ini, hasil penilaian terhadap SAQ memiliki dua kemungkinan hasil yaitu nilai tetap jika dapat menunjukkan bukti yang diminta oleh tim dan nilai berkurang jika tidak terverifikasi karena tidak dapat menunjukkan bukti yang diminta oleh tim. Pada verifikasi factual ini, jika nilai berkurang karena tidak terverifikasi maka langsung dilakukan perubahan di portal *e monev*.

Hasil akhir bagi badan public yang berperingkat informatif adalah setelah verifikasi factual dilaksanakan. Gambaran prosentase hasil peringkat keterbukaan informasi di badan public tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah :



Kemudian jika dilihat perklaster maka hasil hasil monev keterbukaan informasi di badan public se DIY tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut:

No	Klaster	Jml BP	REGIST RASI	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	Tidak dinilai
1	PEM.KAB/KOTA	5	5	5	0	0	0	0	0
2	OPD PEMDA DIY	39	39	15	16	8	0	0	0
3	OPD PEM KAB/KOTA	162	162	88	32	25	10	4	3

No	Klaster	Jml BP	REGISTRASI	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	Tidak dinilai
4	KAPANEWON /KEMANTREN	78	78	35	21	16	5	1	0
5	PARPOL	10	6	1	0	0	1	1	3
6	LEMBAGA YUDIKATIF	14	12	4	3	3	0	2	0
7	INSTANSI VERTIKAL	45	23	5	3	3	3	6	3
8	LEMBAGA NON STRUKTURAL	22	19	11	2	1	1	4	0
9	BUMD	17	13	2	0	3	0	5	3
10	SEKOLAH/ MADRASAH	5	5	0	0	0	1	1	3
	JUMLAH	397	362	166	77	59	21	24	15

Pada tahun ini, jumlah badan publik yang mencapai peringkat informatif mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2022 Badan Publik yang memperoleh kualifikasi Informatif sebanyak 147 Badan Publik (38,48%), pada tahun 2023 ini bertambah 19 Badan Publik atau naik 7,37 %. menjadi 166 Badan Publik (45,86%). Di sisi lain, jumlah badan publik yang tidak informatif pada tahun 2022 sebanyak 53 Badan Publik (13,87%) sedang pada tahun ini berkurang mejadi 15 Badan Publik atau 7,24% sehingga menjadi 24 Badan Publik.

B. Pemberian Apresiasi

Selain penghargaan untuk pemeringkatan, Komisi Infomasi Daerah D.I.Y jugamemberikan penghargaan berupa Apresiasi kepada Badan Publik di Daerah Instimewa Yogyakarta atas upayanya untuk peningkatan keterbukaan Informasi Publik di DIY yang pada tahun ini penganugerahan keterbukaan informasi diberikan apresiasi kepada:

1. PPID Utama Pemerintah Kota Yogyakarta atas keberhasilannya dalam mendorong PPID Pelaksana di wilayahnya memperoleh kualifikasi informatif terbanyak se DIY;
2. PPID Utama Pemda DIY atas keberhasilannya dalam mendorong PPID Pembantunya memperoleh kualifikasi informatif yang mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun lalu (dari 7 OPD menjadi 15 OPD); dan

3. Kalurahan Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo, Kalurahan Jatirejo, lendah, Kulonprogo, dan Kalurahan Dompok, playen , Gunungkidul yang telah partisipasi sebagai peserta dalam Apresiasi Desa Tahun 2022.

BAB III

CATATAN HASIL MONEV

Dari proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023 terdapat beberapa catatan diantaranya adalah :

A. Sisi Badan Publik

1. Komitmen badan publik yang masih kurang sehingga tidak melakukan registrasi sebagai bentuk partisipasi dalam monev yang pada tahun 2023 ini mencapai 8,82%.
2. Masih terdapat Badan Publik yang tidak memperhatikan tata kala yang sudah disosialisasikan sebelumnya.
3. Koordinasi internal badan publik belum berjalan optimal sehingga materi yang disampaikan pada saat sosialisasi monev, tidak tersampaikan secara maksimal ke PLID ataupun petugas yang ditunjuk untuk mengisi SAQ dan sebaliknya.
4. Badan publik tidak memperhatikan petunjuk / panduan pengisian SAQ baik melalui surat ataupun pada saat sosialisasi.
5. Masih terdapat data pendukung yang disampaikan oleh Badan Publik yang tidak relevan dengan pertanyaan.
6. Masih terdapat dokumen data pendukung yang tidak dapat dibuka baik itu di-*compress*, *rar*, *zip*, dan di *cloudstorage* yang masih terkunci.
7. Badan publik mencantumkan data dukung link lebih dari satu tanpa jeda spasi,koma ataupun titik koma sehingga *error* saat dibuka
8. *Link* data pendukung yang belum diarahkan ke *url* yang langsung menjawab pertanyaan.
9. Masih terdapat petugas yang mengisi SAQ lupa user *login* dan *password*
10. Badan publik tidak membuka email setiap hari baik email masuk atau email di spam didalam salah satu pertanyaan saat verifikasi faktual

B. Sisi Tim Monev

1. Mengingat keterbatasan sumber daya maka sosialisasi monev keterbukaan informasi yang dilakukan masih dengan metode hybrid (luring dan daring) sehingga kurang efektif
2. Penjelasan terhadap instrumen dan pertanyaan dalam SAQ dianggap masih kurang detail.
3. Belum semua klaster memiliki pengampu / group sehingga kesulitan koordinasi dan konsolidasi internal

4. Masih terdapat perbedaan tingkat toleransi dalam penilaian antar anggota tim meskipun sudah ada pedoman dan penjelasan tiap pertanyaan
5. Catatan di setiap pertanyaan diwajibkan untuk diisi bila dokumen pendukung tidak sesuai dengan pertanyaan

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN PERBAIKAN

A. KESIMPULAN

1. Tingkat partisipasi pelaksanaan monev tahun 2023 menunjukkan kenaikan sebesar 0,81% dibanding tahun 2022
2. Tingkat pengisian SAQ pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,66% dibanding tahun 2022
3. Badan publik yang memperoleh predikat Informatif di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,37% dibanding tahun 2022

B. SARAN PERBAIKAN

1. Perlu dilakukan sosialisasi di awal dengan metode offline agar lebih efektif
2. Menyusun panduan/penjelasan setiap pertanyaan dalam SAQ lebih detail
3. Meninjau ulang uji akses baik dari metode dan /atau penggunaan tahapan tersebut
4. Perlu penambahan klaster baru, misal Desa/Kalurahan, LSM/CSO, dll
5. Mendorong instansi vertikal ikut berpartisipasi

**LAMPIRAN. HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI BADAN PUBLIK DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2023**

1. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	Pemerintah Kota Yogyakarta	100	Informatif
2.	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	93,33	Informatif
3.	Pemerintah Kabupaten Bantul	93	Informatif
4.	Pemerintah Kabupaten Sleman	91,33	Informatif
5.	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	91	Informatif

2. KATEGORI OPD PEMERINTAH DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	98,67	Informatif
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	97,67	Informatif
3.	Badan Kepegawaian Daerah DIY	97,33	Informatif
4.	Dinas Kesehatan DIY	97	Informatif
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	95,67	Informatif
6.	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	95,67	Informatif
7.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	95	Informatif

8.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	93,67	Informatif
9.	Dinas Sosial DIY	93,33	Informatif
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) DIY	93,33	Informatif
11.	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	93	Informatif
12.	Dinas Perhubungan DIY	92	Informatif
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	91,33	Informatif
14.	Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY	91,33	Informatif
15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	90	Informatif
16.	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	89,33	Menuju Informatif
17.	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	89,33	Menuju Informatif
18.	Dinas Koperasi dan UKM DIY	88,67	Menuju Informatif
19.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	88,33	Menuju Informatif
20.	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	88,33	Menuju Informatif
21.	Biro Hukum Setda DIY	88	Menuju Informatif
22.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) DIY	87,67	Menuju Informatif
23.	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	87,67	Menuju Informatif
24.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	87	Menuju Informatif
25.	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	86,67	Menuju Informatif
26.	Dinas Pariwisata DIY	86	Menuju Informatif
27.	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	84,33	Menuju Informatif
28.	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	82,33	Menuju Informatif

29.	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	82	Menuju Informatif
30.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	81,33	Menuju Informatif
31.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	81,33	Menuju Informatif
32.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY	76,67	Cukup Informatif
33.	Rumah Sakit Paru Respira DIY	76	Cukup Informatif
34.	Inspektorat DIY	75,67	Cukup Informatif
35.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	74	Cukup Informatif
36.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	74	Cukup Informatif
37.	Badan Penghubung Daerah DIY	70,67	Cukup Informatif
38.	Paniradya Kaistimewan DIY	64	Cukup Informatif
39.	Sekretariat DPRD DIY	62,67	Cukup Informatif

3. KATEGORI OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta	100	Informatif
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul	100	Informatif
3.	Inspektorat Kota Yogyakarta	100	Informatif
4.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta	100	Informatif
5.	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	100	Informatif
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	100	Informatif
7.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	100	Informatif
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	100	Informatif
9.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	100	Informatif

10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	100	Informatif
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	100	Informatif
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	100	Informatif
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	99,33	Informatif
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Yogyakarta	99,33	Informatif
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	99,33	Informatif
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul	99	Informatif
17.	Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta	99	Informatif
18.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	98,67	Informatif
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	98,67	Informatif
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	98,33	Informatif
21.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Yogyakarta	98	Informatif
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo	98	Informatif
23.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	97,33	Informatif
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo	96,33	Informatif
25.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo	96,33	Informatif
26.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	96,33	Informatif
27.	RSUD Kota Yogyakarta	96	Informatif

28.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	96	Informatif
29.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	96	Informatif
30.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	96	Informatif
31.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	96	Informatif
32.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta	96	Informatif
33.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman	95,67	Informatif
34.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul	95,33	Informatif
35.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo	95	Informatif
36.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo	95	Informatif
37.	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	95	Informatif
38.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo	95	Informatif
39.	Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta	94,67	Informatif
40.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	94,67	Informatif
41.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul	94,67	Informatif
42.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	94,67	Informatif
43.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman	94,33	Informatif
44.	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	94,33	Informatif
45.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman	94,33	Informatif

46.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	94	Informatif
47.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	94	Informatif
48.	Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul	93,67	Informatif
49.	Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul	93,33	Informatif
50.	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	93,33	Informatif
51.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul	93,33	Informatif
52.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo	93,33	Informatif
53.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	93,33	Informatif
54.	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta	93,33	Informatif
55.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	93,33	Informatif
56.	Bagian Umum dan Protokol Kota Yogyakarta	93	Informatif
57.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo	93	Informatif
58.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	93	Informatif
59.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	93	Informatif
60.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul	92,33	Informatif
61.	Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta	92,33	Informatif
62.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo	92	Informatif
63.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	92	Informatif
64.	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	92	Informatif
65.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo	92	Informatif
66.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	92	Informatif

	Sipil Kabupaten Gunungkidul		
67.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo	92	Informatif
68.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	92	Informatif
69.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	92	Informatif
70.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman	91,67	Informatif
71.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	91,67	Informatif
72.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul	91,67	Informatif
73.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo	91,67	Informatif
74.	Dinas Kesehatan Kab Kulon Progo	91,67	Informatif
75.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta	91,67	Informatif
76.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman	91,67	Informatif
77.	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	91,33	Informatif
78.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	91	Informatif
79.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	91	Informatif
80.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul	90,67	Informatif
81.	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	90,67	Informatif
82.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	90,33	Informatif
83.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul	90,33	Informatif
84.	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo	90,33	Informatif
85.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	90,33	Informatif

86.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul	90	Informatif
87.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo	90	Informatif
88.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul	90	Informatif
89.	Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	89,67	Menuju Informatif
90.	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	89,67	Menuju Informatif
91.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	89,33	Menuju Informatif
92.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	89,33	Menuju Informatif
93.	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	89,33	Menuju Informatif
94.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	89,33	Menuju Informatif
95.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	89,33	Menuju Informatif
96.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman	89	Menuju Informatif
97.	Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul	88,67	Menuju Informatif
98.	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	88,67	Menuju Informatif
99.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	88,67	Menuju Informatif
100.	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	88,67	Menuju Informatif
101.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	88,33	Menuju Informatif
102.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo	88	Menuju Informatif
103.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	88	Menuju Informatif

104.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo	87,33	Menuju Informatif
105.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	86,67	Menuju Informatif
106.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman	86,67	Menuju Informatif
107.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman	86,67	Menuju Informatif
108.	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta	86,33	Menuju Informatif
109.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul	85,33	Menuju Informatif
110.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo	85,33	Menuju Informatif
111.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul	85,33	Menuju Informatif
112.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo	85,33	Menuju Informatif
113.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman	84,67	Menuju Informatif
114.	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo	84,33	Menuju Informatif
115.	RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo	83,67	Menuju Informatif
116.	Inspektorat Kabupaten Sleman	82,33	Menuju Informatif
117.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	81,67	Menuju Informatif
118.	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul	81,33	Menuju Informatif
119.	Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	81	Menuju Informatif
120.	RSUD Panembahan Senopati Bantul	80	Menuju Informatif
121.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta	79	Cukup Informatif
122.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo	78,67	Cukup Informatif
123.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	78	Cukup Informatif

	Kabupaten Gunungkidul		
124.	Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman	77,33	Cukup Informatif
125.	RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul	76,67	Cukup Informatif
126.	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul	76,33	Cukup Informatif
127.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	75,67	Cukup Informatif
128.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul	75	Cukup Informatif
129.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman	74	Cukup Informatif
130.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman	74	Cukup Informatif
131.	Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman	73,67	Cukup Informatif
132.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul	73,33	Cukup Informatif
133.	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	73	Cukup Informatif
134.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	72,67	Cukup Informatif
135.	Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul	72,33	Cukup Informatif
136.	Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul	71,67	Cukup Informatif
137.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	71	Cukup Informatif
138.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	70,33	Cukup Informatif
139.	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	69,67	Cukup Informatif
140.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	68,33	Cukup Informatif
141.	RSUD Saptosari Kabupaten Gunungkidul	68	Cukup Informatif
142.	Dinas Sosial Kabupaten Sleman	67,33	Cukup Informatif
143.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul	67	Cukup Informatif
144.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	65	Cukup Informatif

	Manusia Kabupaten Bantul		
145.	RSUD Nyi Ageng Serang	62,67	Cukup Informatif
146.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman	59	Kurang Informatif
147.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman	57,67	Kurang Informatif
148.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	56,67	Kurang Informatif
149.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman	56	Kurang Informatif
150.	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Bantul	55,67	Kurang Informatif
151.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman	54	Kurang Informatif
152.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul	50,67	Kurang Informatif
153.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	49	Kurang Informatif
154.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman	47,33	Kurang Informatif
155.	Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman	45,33	Kurang Informatif
156.	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	33	Tidak Informatif
157.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	30,67	Tidak Informatif
158.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	28,67	Tidak Informatif
159.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	11,33	Tidak Informatif
160.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman	0	Tidak Informatif
161.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman	0	Tidak Informatif
162.	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	0	Tidak Informatif

4. KATEGORI KAPANEWON/KEMANTREN SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	Kemantren Wirobrajan	100	Informatif
2.	Kemantren Kotagede	100	Informatif
3.	Kemantren Pakualaman	100	Informatif
4.	Kapanewon Piyungan	100	Informatif
5.	Kapanewon Jetis	99	Informatif
6.	Kemantren Kraton	98,67	Informatif
7.	Kapanewon Imogiri	98,67	Informatif
8.	Kapanewon Kalibawang	98,33	Informatif
9.	Kemantren Mergangsan	98,33	Informatif
10.	Kemantren Umbulharjo	98,33	Informatif
11.	Kapanewon Pleret	98	Informatif
12.	Kapanewon Srandakan	98	Informatif
13.	Kemantren Gondomanan	98	Informatif
14.	Kemantren Jetis	98	Informatif
15.	Kemantren Danurejan	97,67	Informatif
16.	Kapanewon Bantul	97,33	Informatif
17.	Kapanewon Mlati	96	Informatif
18.	Kapanewon Galur	94,67	Informatif
19.	Kapanewon Sedayu	94,33	Informatif
20.	Kapanewon Bambanglipuro	93,67	Informatif
21.	Kapanewon Panjatan	93,33	Informatif
22.	Kapanewon Sewon	93,33	Informatif
23.	Kapanewon Depok	93	Informatif

24.	Kapanewon Girimulyo	93	Informatif
25.	Kapanewon Godean	93	Informatif
26.	Kapanewon Sentolo	92,67	Informatif

27.	Kapanewon Tanjungsari	92,33	Informatif
28.	Kemantren Gedongtengen	92,33	Informatif
29.	Kapanewon Pengasih	92	Informatif
30.	Kemantren Ngampilan	91,67	Informatif
31.	Kemantren Gondokusuman	91,67	Informatif
32.	Kemantren Mantriweron	91,33	Informatif
33.	Kapanewon Ngaglik	91,33	Informatif
34.	Kapanewon Pandak	90,67	Informatif
35.	Kapanewon Girisubo	90,33	Informatif
36.	Kapanewon Semin	89,67	Menuju Informatif
37.	Kapanewon Dlingo	89,33	Menuju Informatif
38.	Kapanewon Ponjong	89,33	Menuju Informatif
39.	Kapanewon Pundong	89,33	Menuju Informatif
40.	Kapanewon Sanden	89	Menuju Informatif
41.	Kapanewon Banguntapan	89	Menuju Informatif
42.	Kapanewon Pajangan	88,67	Menuju Informatif
43.	Kapanewon Kretek	88,67	Menuju Informatif
44.	Kapanewon Moyudan	88,67	Menuju Informatif
45.	Kapanewon Kasihan	87,33	Menuju Informatif
46.	Kapanewon Turi	87,33	Menuju Informatif
47.	Kapanewon Rongkop	86	Menuju Informatif
48.	Kapanewon Temon	85,33	Menuju Informatif
49.	Kapanewon Tempel	84,33	Menuju

			Informatif
50.	Kapanewon Minggir	84	Menuju Informatif
51.	Kapanewon Lendah	83,67	Menuju Informatif
52.	Kapanewon Gamping	83,33	Menuju Informatif
53.	Kapanewon Wonosari	82,67	Menuju Informatif
54.	Kapanewon Ngawen	82,67	Menuju Informatif
55.	Kapanewon Panggang	82	Menuju Informatif
56.	Kapanewon Nanggulan	81	Menuju Informatif
57.	Kapanewon Sleman	79,67	Cukup Informatif
58.	Kapanewon Semanu	79	Cukup Informatif
59.	Kapanewon Gedangsari	78,67	Cukup Informatif
60.	Kapanewon Seyegan	76,67	Cukup Informatif
61.	Kapanewon Saptosari	76,33	Cukup Informatif
62.	Kapanewon Playen	76	Cukup Informatif
63.	Kapanewon Karangmojo	76	Cukup Informatif
64.	Kapanewon Berbah	75,67	Cukup Informatif
65.	Kapanewon Prambanan	74	Cukup Informatif
66.	Kapanewon Samigaluh	70,67	Cukup Informatif
67.	Kapanewon Purwosari	69	Cukup Informatif
68.	Kapanewon Kalasan	69	Cukup Informatif
69.	Kapanewon Kokap	66,67	Cukup Informatif
70.	Kapanewon Paliyan	65	Cukup Informatif
71.	Kapanewon Cangkringan	62,67	Cukup Informatif
72.	Kapanewon Tepus	60,67	Cukup Informatif
73.	Kemantren Tegalrejo	56,67	Kurang Informatif

74.	Kapanewon Wates	56,33	Kurang Informatif
75.	Kapanewon Ngemplak	50	Kurang Informatif
76.	Kapanewon Patuk	44,67	Kurang Informatif
77.	Kapanewon Nglipar	44,33	Kurang Informatif
78.	Kapanewon Pakem	39,67	Tidak Informatif

5. KATEGORI PARTAI POLITIK DI DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	DPW NASDEM DIY	90,67	Informatif
2.	DPW PKS DIY	54,67	Kurang Informatif
3.	Partai Solidaritas Indonesia	15,67	Tidak Informatif
4.	DPD Partai Gerindra DIY	0	Tidak Informatif
5.	DPW PKB DIY	0	Tidak Informatif
6.	DPD PDI Perjuangan DIY	0	Tidak Informatif
7.	DPD GOLONGAN KARYA DIY	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
8.	DPD DEMOKRAT DIY	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
9.	DPD PAN DIY	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
10.	DPD PPP DIY	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai

6. KATEGORI LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	Pengadilan Agama Wates	100	Informatif
2.	Pengadilan Agama Yogyakarta	98	Informatif
3.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	96,67	Informatif

4.	Pengadilan Agama Wonosari	95,67	Informatif
5.	Pengadilan Agama Bantul	83,67	Menuju Informatif
6.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	82,67	Menuju Informatif
7.	Pengadilan Negeri Sleman	81,33	Menuju Informatif
8.	Pengadilan Negeri Wates	70,33	Cukup Informatif
9.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	67,67	Cukup Informatif
10.	Pengadilan Agama Sleman	61	Cukup Informatif
11.	Pengadilan Negeri Bantul	39	Tidak Informatif
12.	Pengadilan Negeri Wonosari	22,33	Tidak Informatif
13.	Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
14.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai

7. KATEGORI INSTANSI VERTIKAL DI DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DIY	100	Informatif
2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	100	Informatif
3.	Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul	91	Informatif
4.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY	90,67	Informatif
5.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	90	Informatif
6.	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY	87,67	Menuju Informatif
7.	Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	82,33	Menuju Informatif
8.	Kepolisian Daerah DIY	81,67	Menuju

			Informatif
9.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	78,33	Cukup Informatif
10.	Kepolisian Resor Kulonprogo	72	Cukup Informatif
11.	Kepolisian Resor Gunungkidul	61,33	Cukup Informatif
12.	Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY	55	Kurang Informatif
13.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul	48,33	Kurang Informatif
14.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo	40,33	Kurang Informatif
15.	Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	38	Tidak Informatif
16.	Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta	25,67	Tidak Informatif
17.	BPS Kota Yogyakarta	25,33	Tidak Informatif
18.	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	19	Tidak Informatif
19.	Kepolisian Resor Kota Yogyakarta	10,67	Tidak Informatif
20.	Kepolisian Resor Kota Sleman	2,67	Tidak Informatif
21.	BPS Kabupaten Gunungkidul	0	Tidak Informatif
22.	Kejaksaan Negeri Kulon Progo	0	Tidak Informatif
23.	Kepolisian Resor Bantul	0	Tidak Informatif
24.	Kejaksaan Tinggi DIY	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
25.	Kejaksaan Negeri Sleman	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
26.	Kejaksaan Negeri Yogyakarta	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
27.	Kejaksaan Negeri Bantul	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
28.	Kejaksaan Negeri Gunung Kidul	0	Tidak Partisipatif/Tidak

			dinilai
29.	Komando Resort Militer (KOREM) 072 Pamungkas	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
30.	Komando Distrik Militer (KODIM) Sleman	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
31.	Komando Distrik Militer (KODIM) Kota Yogyakarta	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
32.	Komando Distrik Militer (KODIM) Bantul	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
33.	Komando Distrik Militer (KODIM) Kulonprogo	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
34.	Komando Distrik Militer (KODIM) Gunung Kidul	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
35.	Kanwil Kementerian Agama (KEMENAG) DIY	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
36.	Kementerian Agama (KEMENAG) Sleman	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
37.	Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Yogyakarta	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
38.	Kementerian Agama (KEMENAG) Gunungkidul	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
39.	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
40.	Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
41.	Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
42.	Badan Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai

43.	Kanreg 1 BKN Yogyakarta	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
44.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi DIY	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
45.	BNN Kabupaten Sleman	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai

8. KATEGORI LEMBAGA NON STRUKTURAL DI DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta	98,33	Informatif
2.	Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta	96,67	Informatif
3.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	96,33	Informatif
4.	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DIY	95,67	Informatif
5.	Komisi Pemilihan Umum DIY	95,33	Informatif
6.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	95	Informatif
7.	Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY	94,67	Informatif
8.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	94,33	Informatif
9.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	92,67	Informatif
10.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	90,67	Informatif
11.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	90,67	Informatif
12.	Perwakilan Ombudsman RI DIY	87	Menuju Informatif
13.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	81,67	Menuju Informatif
14.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	70,33	Cukup Informatif
15.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten	44,33	Kurang Informatif

	Gunungkidul		
16.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY	33,33	Tidak Informatif
17.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman	14,33	Tidak Informatif
18.	Baznas Kota Yogyakarta	12,33	Tidak Informatif
19.	Baznas Kabupaten Kulon Progo	11,33	Tidak Informatif
20.	Lembaga Ombudsman DIY	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
21.	Baznas DIY	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
22.	BAZNAS Bantul	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai

9. KATEGORI BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	PT BPR Bank Sleman	100	Informatif
2.	PT BPR Bank Bantul	94,33	Informatif
3.	PD Jogjatama Vishesha	68	Cukup Informatif
4.	Perumda BPR Bank Jogja	67	Cukup Informatif
5.	Perumda PDAM Tirtamarta	63,33	Cukup Informatif
6.	Perumdam Tirta Projotamansari	31	Tidak Informatif
7.	PDAM Tirta Handayani	18,67	Tidak Informatif
8.	PT Selo Adikarto	10,33	Tidak Informatif
9.	PT Anindya Mitra Internasional	8,67	Tidak Informatif
10.	Perumda BPR Bank Kulon Progo	3,67	Tidak Informatif
11.	Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo	0	Tidak Informatif
12.	Perumda Aneka Usaha Kulon Progo	0	Tidak Informatif
13.	Perumda Aneka Dharma	0	Tidak Informatif

14.	PDAM Kabupaten Sleman	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
15.	PT BPR Bank Daerah Gunungkidul	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
16.	Bank BPD DIY	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai
17.	PD Taru Martani DIY	0	Tidak Partisipatif/Tidak dinilai

10. KATEGORI SEKOLAH/MADRASAH

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	SMAN Negeri 7 Yogyakarta	59	Kurang Informatif
2.	SMAN Negeri 1 Sewon	28,33	Tidak Informatif
3.	MAN 1 Yogyakarta	0	Tidak Informatif
4.	SMK Negeri 2 Yogyakarta	0	Tidak Informatif
5.	MAN 3 Sleman	0	Tidak Informatif